

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang mendasar bagi setiap negara, terutama bagi negara berkembang. Kemiskinan juga menjadi persoalan yang paling mendapatkan perhatian dari pemerintah di setiap negara. Guna menanggulangi kemiskinan, maka diperlukan keakuratan data demi menyusun strategi yang tepat. Lewat data kemiskinan yang akurat dan baik, maka pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai bahan untuk menentukan kebijakan di masa depan dalam rangka menangani permasalahan kemiskinan.

Menurut Bank Dunia atau *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikannya juga rendah.

Sampai masa orde baru berakhir, pembangunan ekonomi Indonesia terpusat di pulau Jawa, sedangkan propinsi di luar pulau Jawa belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hingga zaman orde baru, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi. Walau sebenarnya pada saat itu diberlakukan UU No.5 Tahun 1974 yang meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah tetapi praktiknya masih belum berjalan dengan baik.

Setelah masa orde baru berakhir yang juga bertepatan dengan krisis di wilayah Asia, baru ada upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan B.J Habibie mengambil tindakan untuk menggantikan UU No.5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU tersebut, pemerintah menyatakan bahwa daerah menggunakan asas desentralisasi atau otonom, memiliki kewenangan dan kebebasan membentuk melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab demi menghadapi permasalahan politik dan ekonomi daerah.

Namun perubahan tersebut tidak langsung memberikan dampak masif secara instan, beberapa propinsi khususnya wilayah Indonesia bagian timur hingga kini masih mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek termasuk perekonomian dibanding dengan propinsi di pulau Jawa. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kemiskinan di wilayah Indonesia timur rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat ataupun tengah. Terutama di propinsi Papua, kemiskinan menjadi isu yang sangat serius karena berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS tingkat kemiskinan di propinsi Papua begitu memprihatinkan.

Di tahun 2000, Indonesia yang tergabung dalam PBB menandatangani Deklarasi Milenium guna menunjukkan komitmen untuk mencapai delapan sarana pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDG's*). Salah satu poin yang ada dalam deklarasi tersebut adalah pengentasan kemiskinan. Hal ini

menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang paling perlu diatasi sehingga taraf kehidupan rakyat dapat menjadi lebih berkualitas.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tentunya bakal mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah, yang tentunya juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah. Mudrajat Kuncoro menganalisis penyebab kemiskinan dari dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Dalam faktor ekonomi lebih disebabkan karena rendahnya akses terhadap lapangan kerja dan akses faktor produksi. Semakin rendahnya akses terhadap lapangan kerja, maka dapat menurunkan tingkat produktifitas penduduk yang tentunya bakal menurunkan tingkat pendapatan. Dengan menurunnya tingkat pendapatan sampai ke taraf tertentu dan melewati garis kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa penduduk tersebut sudah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Sementara, apabila penduduk memiliki kekurangan akses terhadap faktor produksi seperti modal usaha, akses pasar, serta sedikitnya kepemilikan aset maka usaha penduduk untuk produktif dan meraih pendapatan bakal terhambat. Tentunya kedua hal ini dapat menyebabkan jumlah masyarakat atau penduduk miskin semakin meningkat.

Penyebab kemiskinan dari faktor sosial disebabkan karena rendahnya akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Apabila masyarakat tidak memiliki akses dan kualitas pendidikan yang mumpuni, maka usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya bakal terhambat. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Tingkat pendidikan yang rendah

juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Selain itu, tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Peningkatan tingkat kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

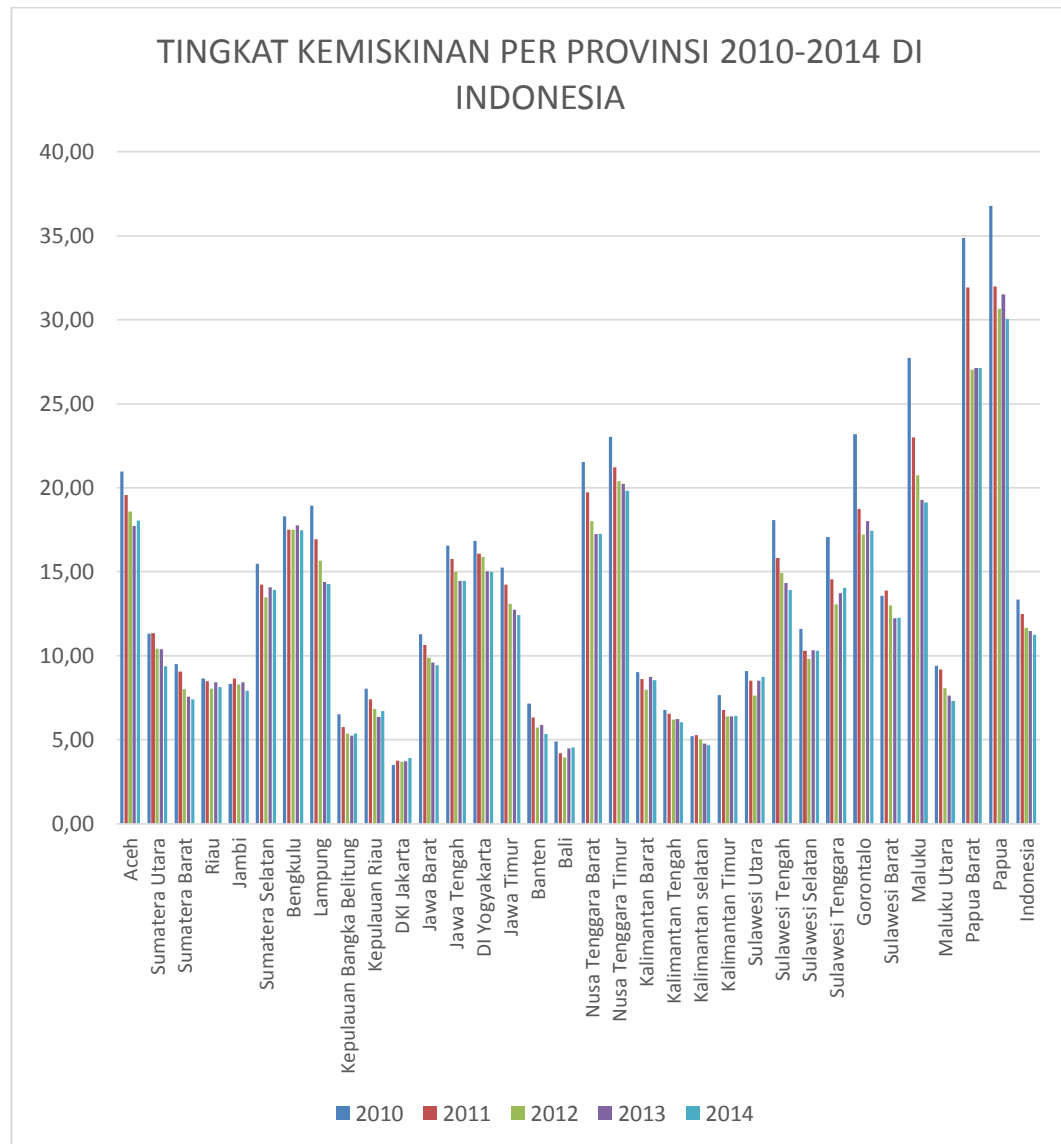
Menurut Sudibyo (2007)¹, peran pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Campur tangan pemerintah dalam permasalahan pengentasan kemiskinan dapat dilihat lewat alokasi penggunaan anggaran APBD. Lewat pengalokasian yang baik maka pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan sementara apabila pengalokasian dana APBD buruk maka dapat menimbulkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian penduduk. Hal ini pun terjadi di propinsi Papua karena pengeluaran pemerintah daerah di beberapa sektor yang vital untuk menanggulangi kemiskinan seperti sektor pendidikan dan kesehatan terbilang mini dibandingkan dengan daerah lainnya.

Menurut BPS (2014)², Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu,

¹Sudibyo Markus *et al*, *Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), h. 19

² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Badan Pusat Statistik:2014, h.42

pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.



Gambar I.1

*Sumber: bps.go.id *data diolah oleh peneliti.*

Berdasarkan data di atas yang menunjukkan tingkat kemiskinan seluruh propinsi di Indonesia tahun 2010-2014, dapat dilihat bahwa Papua memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata dan yang paling tinggi dibandingkan dengan

propinsi lainnya setiap tahun. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan Papua mencapai 36.80% sementara rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia hanya 13.33% saja. Lalu, di tahun 2011 tingkat kemiskinan di provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 31.98% sementara tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia adalah 13.33%. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Papua masih yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dengan angka sebesar 30.66% atau hampir tiga kali lipat dari rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia yang hanya 11.66%. Di tahun 2013 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi Papua, sebesar 0,87% dari tahun sebelumnya menjadi 31,53%, padahal rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,19%. Terakhir, pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di provinsi Papua mengalami penurunan menjadi 30,05% namun angka tersebut masih sekitar 2,67 kali lipat dibandingkan tingkat kemiskinan rata-rata di Indonesia yang hanya 11,25%.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan tersebut, dapat terlihat bahwa provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan menjadi salah satu fokus terbesar bagi pemerintah daerah yang ada di provinsi bagian timur wilayah Indonesia tersebut. Menurut BPS³, berbagai permasalahan menjadi penyebab tingkat kemiskinan di Papua begitu tinggi, mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, banyaknya imigran yang datang ke Papua setiap tahun, sampai dengan masalah yang sangat fundamental yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan. BPS menjelaskan bahwa perbaikan di sektor tingkat

³<http://tabloidjubi.com/16/2016/02/25/ini-penyebab-kemiskinan-di-papua-menurut-bps/> diakses pada tanggal 28 Desember 2016

pendidikan, kesehatan dan merupakan kunci utama bagi setiap kabupaten/kota di provinsi Papua untuk keluar dari jerat kemiskinan yang begitu hebat. Masih berdasarkan pernyataan BPS, kabupaten Mimika dan kota Jayapura menjadi dua kabupaten/kota dengan perekonomian yang paling baik. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten/kota tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Papua.

Tabel I.1 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua 2010-2014

Rata-rata Lama Sekolah	2010	2011	2012	2013	2014
Provinsi Papua	5.59	5.6	5.73	5.74	5.76
Indonesia	11.29	11.44	11.68	12.10	12.39

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tahun 2010 sampai tahun 2014, rata-rata lama sekolah di provinsi Papua mengalami kenaikan setiap tahunnya walau kenaikan yang terjadi tidak begitu besar. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah di Papua hanya 5,59 tahun sementara di Indonesia adalah 11,29 tahun. Lalu di tahun 2011 rata-rata lama sekolah di provinsi Papua adalah 5,6 tahun sementara rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 11,44 tahun. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 kenaikan rata-rata lama sekolah di provinsi Papua sangat lah kecil yaitu sebesar 0,01 tahun pada tahun 2012 ke tahun 2013 dan 0,02 tahun pada tahun 2013 ke 2014. Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai 7,73 tahun atau setara dengan kelas VII. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,39

tahun atau mencapai Diploma I. Selama empat tahun terakhir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat. Rata-rata lama sekolah tumbuh 0,92 persen per tahun, sementara harapan lama sekolah tumbuh 2,44 persen per tahun. Di tingkat provinsi, rata-rata lama sekolah berkisar antara 5,76 tahun hingga 10,54 tahun. Penduduk 25 tahun ke atas dengan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Sementara, provinsi Papua memiliki angka rata-rata lama sekolah di bawah rata-rata dari keseluruhan provinsi lain di Indonesia. Bahkan Rata-rata Lama Sekolah provinsi Papua adalah yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya dengan angka rata-rata lama sekolah hanya 5,76 tahun. Lewat data ini dapat disimpulkan bahwa provinsi Papua memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Menurut keterangan dari BPS dalam bukunya⁴, data menunjukkan bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di provinsi Papua selalu berada jauh di bawah nilai rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2010-2014 provinsi Papua memiliki rata-rata lama sekolah yang paling rendah, hanya 5,59 tahun pada tahun 2010, 5,6 tahun pada tahun 2011, 5,73 tahun pada tahun 2012, 5,74 tahun pada tahun 2013, dan 5,76 tahun pada tahun 2014. Berdasarkan pernyataan dan data dari BPS tersebut berarti bahwa tingkat pendidikan penduduk menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Papua.

Menurut Fitri Amalia (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010*”, ditemukan fakta bahwa

⁴Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Badan Pusat Statistik:2014, h.42

pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Seperti yang diungkapkan oleh Amartya Sen dalam Todaro (2012)⁵, dirinya berpendapat bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktifitas dalam ekonomi dan juga meningkatkan penghasilan. Sebagaimana telah diketahui, dalam mengukur tingkat kemiskinan, jumlah penghasilan digunakan sebagai tolak ukurnya, dimana dalam mengentaskan kemiskinan pemerintah perlu membantu masyarakat untuk dapat memiliki jumlah penghasilan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi, apabila penghasilan penduduk meningkat dan melewati batas atau garis kemiskinan maka tingkat kemiskinan di suatu wilayah bakal berkurang.

Provinsi Papua memiliki angka harapan hidup yang cukup buruk setiap tahunnya pada periode 2010-2014. Bahkan, dapat dikatakan bahwa provinsi Papua memiliki angka harapan hidup yang sangat memprihatinkan karena masuk dalam lima terendah di Indonesia. Tentu hal tersebut bukanlah pencapaian yang baik, apalagi mengingat faktor kesehatan yang dapat ditunjukkan oleh angka harapan hidup merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perekonomian di sebuah wilayah. Buruknya angka harapan hidup di provinsi Papua dapat terlihat lewat data yang diluncurkan oleh BPS dalam rentang waktu tahun 2010-2014. Dalam data yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai organisasi riset resmi di Indonesia, terlihat sekali bahwa angka harapan hidup di Papua termasuk sangat memprihatinkan. Angka harapan hidup di Papua yang berada di bawah rata-rata merepresentasikan tingkat kesehatan masyarakat setempat yang berarti

⁵ Todaro & Smith, *Economic Development*, PEARSON: 2012 h.359

kurang baik. Untuk lebih lengkapnya, peneliti menyajikan data angka harapan hidup di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2014 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistika sebagai salah satu data penunjang dalam melakukan penelitian ini.

Tabel I.2 Angka Harapan Hidup per Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	69.13	69.21	69.27	69.35	69.39
Sumatera Utara	67.51	67.69	67.86	67.99	68.09
Sumatera Barat	67.64	67.84	68.05	68.26	68.36
Riau	70.20	70.37	70.54	70.72	70.81
Jambi	69.94	70.09	70.24	70.40	70.48
Sumatera Selatan	68.40	68.56	68.72	68.89	68.97
Bengkulu	67.87	68.03	68.21	68.38	68.41
Lampung	68.96	69.17	69.38	69.60	69.70
Kep. Bangka Belitung	69.20	69.36	69.53	69.69	69.77
Kep. Riau	68.47	68.68	68.90	69.10	69.20
Dki Jakarta	71.76	71.91	72.08	72.24	72.32
Jawa Barat	71.34	71.61	71.87	72.14	72.27
Jawa Tengah	72.78	72.96	73.14	73.33	73.92
Di Yogyakarta	74.21	74.31	74.41	74.50	74.54
Jawa Timur	69.95	70.07	70.19	70.39	70.50
Banten	68.54	68.72	68.91	69.09	69.18
Bali	70.66	70.83	70.99	71.16	71.24
Nusa Tenggara Barat	63.86	64.18	64.48	64.79	64.95
Nusa Tenggara Timur	65.33	65.50	65.69	65.86	65.95
Kalimantan Barat	69.11	69.32	69.52	69.71	69.81
Kalimantan Tengah	69.07	69.16	69.26	69.32	69.43
Kalimantan Selatan	66.70	66.93	67.16	67.40	67.51
Kalimantan Timur	72.94	73.15	73.37	73.57	73.68
Kalimantan Utara	-	-	-	71.97	72.08
Sulawesi Utara	70.45	70.60	70.75	70.90	70.98
Sulawesi Tengah	66.12	66.44	66.75	67.07	67.23
Sulawesi Selatan	68.98	69.16	69.36	69.55	69.64
Sulawesi Tenggara	69.70	69.90	70.11	70.33	70.43
Gorontalo	66.46	66.64	66.81	66.97	67.06
Sulawesi Barat	62.55	62.82	63.09	63.37	64.09
Maluku	64.51	64.66	64.82	64.97	65.05
Maluku Utara	66.75	66.93	67.10	67.30	67.40
Papua Barat	64.64	64.80	64.93	65.10	65.18
Papua	64.31	64.46	64.60	64.76	64.84
Indonesia	68.42	68.61	68.79	69.06	69.19

Sumber:bps.go.id *data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan data yang diluncurkan oleh BPS, angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2010-2014 di tingkat propinsi berkisar antara 63,86 tahun hingga 74,54 tahun dengan rata-rata sebesar 68,42 tahun (2010), 68,61 tahun (2011), 68,79 tahun (2012), 69,06 (2013), dan 69,19 tahun (2014). Sejak tahun 2010-2014, provinsi Papua memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata dari angka harapan hidup Indonesia. Pada tahun 2010 angka harapan hidup di Papua hanya 64,31 tahun, tahun 2011 hanya 64,46 tahun, lalu tahun 2012 adalah 64,60 tahun, selanjutnya di tahun 2013 hanya mencapai 64,76 tahun dan terakhir di tahun 2014 angka harapan hidup di provinsi Papua hanyalah 64,84 tahun. Tentunya hal ini menjadi bukti bahwa angka harapan hidup di provinsi Papua yang merupakan tolak ukur tingkat kesehatan masyarakat setempat kurang baik apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Buruknya angka harapan hidup di Papua disebabkan oleh banyak hal, mulai dari minimnya akses dan fasilitas kesehatan masyarakat, hingga alokasi anggaran pengeluaran pemerintah daerah setempat yang dirasa kurang efektif dan efisien. Padahal seharusnya, tingkat kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih pemerintah daerah setempat untuk mengentaskan kemiskinan yang jadi permasalahan besar di provinsi Papua.

Menurut Todaro (2012)⁶, peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan produktifitas seseorang. Kualitas kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia, dimana kualitas sumber daya manusia yang baik tentu dapat meningkatkan produktifitas seseorang

⁶ Todaro & Smith, *Economic Development*, PEARSON: 2012 h.359

dalam meraih pendapatan sehingga nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Edi Dores dan Jolianes dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Sumatera Barat*”. Dalam penelitian tersebut didapatkan fakta bahwa Angka Harapan Hidup yang menggambarkan tingkat kesehatan penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Masalah yang dihadapi provinsi Papua saat ini terkait dengan masalah tingginya kemiskinan tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang menjadi perhatian utama peneliti dalam hal ini adalah rendahnya pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kualitas sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Begitu pun tingkat kesehatan penduduk yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kualitas sumber daya manusia apabila suatu wilayah ingin menekan tingkat kemiskinan. Dimana dalam melakukan pembangunan manusia terdapat dua faktor yang sangat penting yaitu pendidikan dan kesehatan penduduk. Sehingga peningkatan pendidikan dan kesehatan penduduk dapat dijadikan senjata untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2010-2014 provinsi Papua mengalami permasalahan terkait tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Hal tersebut dapat terlihat

dari rendahnya rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator tingkat pendidikan yang berada di bawah rata-rata dan paling rendah dibanding propinsi lain di Indonesia selama periode 2010-2014. Tidak hanya itu, Angka Harapan Hidup yang juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan penduduk provinsi Papua yang selalu berada di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup di Indonesia selama periode 2010-2014 menjadi bukti nyata permasalahan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dihadapi oleh Provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia ini. Maka dari itu, diperlukan tanggapan yang serius bagi pemerintah provinsi Papua dalam mengatasi kedua permasalahan ini. Seperti yang telah diketahui, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang tergambar dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup adalah gambaran dari pembangunan manusia dan menjadi dua hal penting yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah kemiskinan dengan judul “*Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2010-2014*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2014.

2. Pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2014.
3. Pengaruh alokasi pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2104
4. Pengaruh imigran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2014.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah kemiskinan memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2010-2014”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua tahun 2010-2014?

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak pembaca, baik secara teoritis, maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan juga referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Papua.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah dalam mengurangi maupun menuntaskan kemiskinan. Serta diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan agar masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sejahtera.